



Analisis Tata Kelola Ekowisata Kereng Bengkirai sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kawasan Taman Nasional Sebangau

Safitri Muflikhah^{1*}, Khairina Nor Hafifah², Delia Putri Maharani³, Fitriana Selvia⁴,
Bhayu Rhama⁵, Imanuel Jaya⁶, Sri Mujiarti Ulfah⁷, Marvy Ferdian Agusta Sahay⁸

¹⁻⁸Ilmu Adimistrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muflikhahsafitri@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the ecotourism governance of Kereng Bengkirai as a sustainable tourism destination located within Sebangau National Park. Sustainable ecotourism governance requires effective collaboration among government agencies, local communities, tourism managers, and other stakeholders to ensure environmental conservation while improving community welfare. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observations, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed based on governance principles and the 4A tourism components, namely Attractions, Amenities, Accessibility, and Ancillary Services. The findings reveal that the governance of Kereng Bengkirai ecotourism has not yet been implemented optimally. This condition is reflected in the limited participation of local communities in decision-making processes, insufficient transparency in program implementation, unclear accountability among stakeholders, and weak coordination between institutions. In addition, inadequate tourism facilities, limited accessibility, and the low capacity of human resources remain significant challenges in supporting sustainable tourism development. Despite its considerable natural and ecological potential, these governance constraints reduce the effectiveness of tourism management and limit its contribution to local economic development and environmental conservation. Therefore, strengthening governance through greater community participation, improved transparency and accountability, enhanced stakeholder collaboration, capacity building, and better supporting infrastructure is essential to achieve sustainable ecotourism management and ensure the long-term preservation of Kereng Bengkirai as one of Indonesia's ecotourism destinations.*

Keywords: *Community Participation; Ecotourism; Governance; Kereng Bengkirai; Sustainable Tourism.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola ekowisata Kereng Bengkirai sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang berada di kawasan Taman Nasional Sebangau. Tata kelola ekowisata yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat lokal, pengelola wisata, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan aspek tata kelola serta komponen pariwisata 4A yang meliputi *Attractions, Amenities, Accessibility, dan Ancillary Services*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola ekowisata Kereng Bengkirai masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, rendahnya transparansi dalam pelaksanaan program, belum jelasnya akuntabilitas antarpemangku kepentingan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung, aksesibilitas, dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi alam dan ekologi yang besar, berbagai permasalahan tersebut mengurangi efektivitas pengelolaan serta manfaatnya terhadap perekonomian masyarakat dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola melalui peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kolaborasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sarana dan prasarana guna mewujudkan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan.

Kata kunci: Ekowisata; Kereng Bengkirai; Pariwisata Berkelanjutan; Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas tinggi telah menjadikan ekowisata sebagai pilar utama strategi pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional mencapai 8-10% melalui

pengembangan destinasi hijau di kawasan konservasi. Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah, dengan luas 5.683 km² dan ekosistem rawa gambut tropika yang menyimpan 30% cadangan gambut nasional, menjadi representasi lanskap sosial ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, potensi ekowisata mendukung restorasi gambut nasional pasca kebakaran 2015, di sisi lain, tekanan deforestasi dan konversi lahan mencapai 1.200 ha/tahun akibat aktivitas ilegal (Ganisia et al., 2026).

Fenomena ini semakin relevan di era pascapandemi COVID-19, di mana kunjungan wisata nasional rebound 20-30% pada 2025, mendorong pemerintah daerah Kalteng untuk mengoptimalkan destinasi seperti Dermaga Kereng Bengkirai sebagai gerbang ekowisata air hitam. Namun, dalam landscape organisasional yang lebih luas, tata kelola ekowisata sering kali terjebak antara kebijakan pusat (UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) dan dinamika lokal masyarakat Dayak yang bergantung pada sungai untuk mata pencaharian. "Ekowisata di Taman Nasional Sebangau menjadi contoh bagaimana pariwisata alam dapat menjadi instrumen konservasi sekaligus pemberdayaan ekonomi, tetapi memerlukan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan iklim dan preferensi wisatawan milenial" (Bhayurhama, 2017; Trimandala et al., 2026).

Kereng Bangkirai berkembang sebagai pintu masuk menuju kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau dan menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berbasis pada ekosistem rawa gambut. Kawasan ini memiliki daya tarik berupa susur sungai, wisata hutan gambut, pengamatan satwa, wisata budaya masyarakat lokal, serta aktivitas wisata berbasis perahu yang memanfaatkan aliran sungai dan kanal di sekitar kawasan. Keberadaan kereng bangkirai juga sangat penting karena kawasan ini merupakan bagian dari bentang alam Taman Nasional Sebangau yang memiliki fungsi ekologis tinggi (Hartanto et al., 2026). Dengan demikian, pengembangan wisata di Kereng Bangkirai sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara fungsi konservasi dan pemanfaatan ekonomi. Potensi tersebut menjadikan Kereng Bangkirai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan, khususnya di Kalimantan Tengah yang selama ini dikenal memiliki kekayaan ekosistem gambut dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh tata kelola yang memadai sehingga pengembangan wisata di kawasan ini masih menghadapi berbagai persoalan (Fauzan et al., 2025; Bursan et al., 2026).

Penelitian Setiawan & Triani (2023) menunjukkan bahwa pengembangan wisata di Kereng Bangkirai telah berjalan melalui pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT), yaitu model pengelolaan wisata yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan destinasi. Masyarakat sekitar telah terlibat dalam berbagai aktivitas wisata, seperti pengelolaan perahu susur sungai, pengelolaan area parkir, kios, warung, gazebo, dermaga, hingga penyediaan jasa bagi wisatawan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata di Kereng Bangkirai telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi CBT di Kereng Bangkirai masih belum berjalan optimal, terutama pada dimensi sosial dan lingkungan. Pengelolaan wisata selama ini lebih banyak berorientasi pada aspek ekonomi, sedangkan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat masih belum mendapat perhatian yang memadai. Hal tersebut terlihat dari belum adanya pengaturan mengenai daya dukung kawasan (*carrying capacity*), sehingga jumlah wisatawan dan aktivitas wisata belum disesuaikan dengan kemampuan lingkungan untuk menampungnya. Selain itu, sebagian wisatawan juga masih belum memahami karakteristik kawasan gambut dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, sehingga aktivitas wisata berpotensi menimbulkan kerusakan pada kawasan yang menjadi daya tarik utama Kereng Bangkirai (Setiawan & Triani, 2023).

Persoalan lain yang juga cukup menonjol adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas penunjang wisata. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat, fasilitas yang tersedia di kawasan Kereng Bangkirai masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan wisatawan maupun mendukung aktivitas wisata secara optimal. Sarana seperti lahan parkir, toilet, tempat sampah, pusat informasi, jalur pedestrian, papan petunjuk, area istirahat, dan fasilitas keamanan masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dokumen resmi Balai Taman Nasional Sebangau (2024) melaporkan 15.000 pengunjung/tahun, dengan keluhan utama pada kurangnya pusat informasi digital dan jalur pejalan kaki yang rawan longsor, membuktikan bahwa fenomena ketidaksiapan fasilitas benar-benar ada dan memengaruhi daya saing destinasi (Laporan Kajian Pemetaan Klaster, Scribd, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan kawasan wisata terlihat kurang tertata dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan, misalnya karena kurangnya tempat sampah dan pengelolaan limbah yang memadai. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rhama & Setiawan (2022) yang menjelaskan bahwa kawasan ekowisata di Kalimantan pada umumnya

masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain lemahnya kemitraan antaraktor, belum optimalnya manajemen destinasi, terbatasnya sarana dan akomodasi, rendahnya kemampuan interpretasi wisata, serta belum kuatnya identitas dan keunikan produk wisata. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wisata yang sebenarnya cukup besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan kata lain, keberadaan potensi alam saja tidak cukup untuk menjadikan suatu kawasan sebagai destinasi wisata unggulan apabila tidak diikuti oleh pengelolaan, fasilitas, dan kualitas sumber daya manusia yang memadai (Rhama & Setiawan, 2022).

Dalam konteks pengelolaan fasilitas wisata, masyarakat sekitar Kereng Bangkirai sebenarnya telah berpartisipasi secara langsung melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan kelompok usaha masyarakat. Partisipasi tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam membangun, mengelola, dan memelihara berbagai fasilitas wisata seperti perahu wisata, area parkir, kios, toilet, gazebo, dermaga, dan fasilitas pendukung lainnya. Masyarakat juga berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan kawasan, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta memberikan pelayanan kepada wisatawan. Selain itu, masyarakat ikut terlibat dalam menentukan fasilitas apa saja yang perlu ditambah atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait rendahnya kemampuan pengelolaan, minimnya pelatihan, dan kurangnya pemahaman mengenai konsep pariwisata berkelanjutan. Penelitian mengenai pengembangan sumber daya manusia di Desa Wisata Kereng Bangkirai menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dan pengelola masih belum memahami secara utuh mengenai tata kelola destinasi, pelayanan wisata, promosi digital, pengelolaan lingkungan, dan pentingnya konservasi kawasan gambut. Akibatnya, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat teknis dan belum berkembang ke arah pengambilan keputusan maupun perencanaan jangka panjang. Padahal, dalam konsep ekowisata, masyarakat lokal seharusnya tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai subjek utama yang terlibat dalam setiap proses pengelolaan destinasi.

Selain persoalan sumber daya manusia, masalah lingkungan juga masih menjadi tantangan yang cukup serius dalam pengembangan Kereng Bangkirai sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Sebagai kawasan yang berbasis pada ekosistem rawa gambut, Kereng Bangkirai memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu persoalan yang masih sering ditemukan adalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Sampah rumah tangga dan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas wisatawan masih

banyak ditemukan di area wisata maupun di sekitar sungai dan dermaga. Kondisi ini tidak hanya mengganggu keindahan kawasan, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem gambut dan menurunkan kualitas lingkungan. Penelitian Wulandari et al. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan Kereng Bangkirai masih memiliki kebiasaan membuang dan membakar sampah tanpa proses pemilahan, sedangkan pengelolaan sampah organik dan anorganik belum dilakukan secara terstruktur. Selain itu, penerapan prinsip green economy dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat juga masih belum berjalan secara optimal. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka aktivitas wisata justru berpotensi merusak sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama kawasan wisata Kereng Bangkirai (Wulandari et al., 2025). Dengan demikian, pengembangan wisata di kawasan ini harus disertai dengan upaya pelestarian lingkungan yang lebih serius, baik melalui penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, edukasi kepada masyarakat dan wisatawan, maupun penguatan aturan mengenai pemanfaatan kawasan wisata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Kereng Bangkirai memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan, namun pengembangan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola, infrastruktur, partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan pelestarian lingkungan. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wisata di Kereng Bangkirai tidak hanya bergantung pada besarnya potensi alam yang dimiliki, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana kawasan tersebut dikelola secara kolaboratif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai tata kelola ekowisata di Kereng Bangkirai penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan kawasan dilaksanakan, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan fasilitas wisata, siapa saja aktor yang terlibat, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengembangan Kereng Bangkirai sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses tata kelola ekowisata di Kereng Bangkirai serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata. Analisis dalam penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengkaji praktik pengelolaan berdasarkan kerangka teori tata kelola pariwisata berkelanjutan. Dalam penelitian ini, analisis tata kelola mengacu pada pemenuhan aspek-aspek manajemen destinasi

yang fungsional, yang menekankan pentingnya sinergi dan keterpaduan peran antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pengelolaan ruang publik. Tata kelola yang baik dalam konteks pariwisata menjadi penting karena mampu menciptakan pengelolaan destinasi yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan terkoordinasi dengan baik. Dalam sektor pariwisata, tata kelola yang efektif berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pengembangan wisata tidak merusak sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama.

Lebih lanjut, tata kelola pariwisata yang baik juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan fisik maupun kelembagaan, memperkuat hubungan kerja antarpemangku kepentingan, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal. Tanpa tata kelola yang baik, pengembangan pariwisata berpotensi menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan ekonomi di sekitar objek wisata. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola lapangan yang sehat menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan, khususnya pada kawasan ekowisata seperti Kereng Bangkirai. Lokasi penelitian berada di kawasan wisata Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling yang melibatkan Pengelola Wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal, pelaku usaha, dan wisatawan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi penunjang. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan indikator tata kelola fungsional, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, akuntabilitas pengelolaan, dan koordinasi antaraktor. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi komprehensif untuk memudahkan identifikasi kesenjangan antara kondisi ideal tata kelola destinasi dengan realitas operasional di lapangan. Penyajian analisis yang terstruktur ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola telah diimplementasikan dalam menyokong keberlanjutan komponen *Attractions, Amenities, Accessibility, dan Ancillary Services* di kawasan ekowisata Kereng Bangkirai.

Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan identifikasi kesenjangan antara kondisi ideal tata kelola dengan realitas di lapangan. Penyajian dalam bentuk tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai sejauh mana prinsip tata kelola telah diterapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Analisis terhadap pengembangan ekowisata di Kereng Bangkirai melalui kerangka teori 4A Alastair M. Morrison menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara potensi alam dengan realitas tata kelola di lapangan. Dari aspek atraksi (*Attractions*), keunikan ekosistem air hitam dan hutan rawa gambut tetap menjadi magnet utama yang memiliki nilai jual tinggi. Upaya pengelola dalam menjaga keaslian habitat, seperti mempertahankan vegetasi pohon rasau dan merancang gazebo dengan arsitektur lokal, menunjukkan komitmen terhadap pelestarian identitas alam. Namun, secara substansi, aspek interpretasi wisata masih sangat lemah. Hal ini sejalan dengan pandangan

Bhayurhama (2017) yang menegaskan bahwa ekowisata seharusnya tidak hanya menjadi objek rekreasi, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen konservasi yang adaptif dan memberikan edukasi mendalam bagi wisatawan mengenai pentingnya ekosistem tersebut bagi keseimbangan iklim global. Lemahnya interpretasi di lapangan seperti minimnya informasi mengenai dinamika hidrologi rawa gambut atau peran penting pohon rasau dalam menjaga garis pantai sungai mengurangi nilai substansial dari kunjungan tersebut. Seharusnya, atraksi wisata dirancang sedemikian rupa agar setiap komponen alam yang dilihat pengunjung dapat berbicara mengenai fungsinya dalam ekosistem. Dengan memperkuat literasi melalui media interpretasi yang adaptif, pengelolaan kawasan ini dapat beralih dari sekadar rekreasi berbasis alam menjadi instrumen pendidikan lingkungan yang mampu mengubah perilaku wisatawan untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan ekosistem gambut di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian, Kelemahan pada aspek atraksi di atas berakar dari pincangnya tata kelola pada komponen 4A lainnya, yaitu penyediaan fasilitas (*amenities*), keterjangkauan (*accessibility*), serta layanan kelembagaan tambahan (*ancillary services*).

Untuk mempermudah pemahaman mengenai kesenjangan antara kondisi ideal tata kelola fungsional dengan realitas di lapangan, berikut disajikan tabel analisis tata kelola objek wisata:

Tabel 1. Analisis Tata Kelola Ekowisata Kereng Bangkirai.

Aspek Tata Kelola	Indikator	Kondisi Ideal	Temuan Lapangan	Keterangan
Partisipasi	Keterlibatan Masyarakat	Masyarakat terlibat dalam perencanaan & pengambilan keputusan	Masyarakat hanya terlibat pada operasional	Belum Optimal
Transparansi	Keterbukaan Informasi	Informasi pengelolaan terbuka	Minim sosialisasi dari pemerintah	Lemah
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban	Pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan	Distribusi manfaat belum jelas	Kurang
Kolaborasi	Kerja Sama Antaraktor	Sinergi pemerintah, masyarakat, dan swasta	Koordinasi masih parsial	Belum Efektif

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tata kelola ekowisata di Kereng Bangkirai masih belum berjalan secara optimal pada aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep tata kelola yang ideal dengan praktik pengelolaan fisik di lapangan. Padahal, pengembangan seluruh pengembangan komponen 4A memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar pengelolaan kawasan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata. Hal ini membuktikan temuan Rhama & Setiawan (2022) yang menjelaskan bahwa kawasan ekowisata di Kalimantan pada umumnya masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain lemahnya kemitraan antaraktor, belum optimalnya manajemen destinasi, terbatasnya sarana dan akomodasi, rendahnya kemampuan interpretasi wisata, serta belum kuatnya identitas dan keunikan produk wisata adalah benar adanya.

Pada aspek partisipasi dalam penyediaan amenities (fasilitas), masyarakat memang sudah terlibat dalam aktivitas wisata, namun keterlibatan tersebut masih terbatas pada kegiatan operasional. Masyarakat belum banyak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata. Kondisi ini menyebabkan masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana, bukan sebagai bagian utama dalam menentukan arah pengelolaan kawasan wisata. Padahal, dalam konsep ekowisata berbasis masyarakat, keterlibatan warga sejak tahap perencanaan sangat penting agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Pada aspek transparansi dan pelemahan *ancillary services* (lembaga pendukung), di lapangan masih ditemukan kurangnya keterbukaan informasi dari pihak pengelola maupun pemerintah kepada masyarakat. Minimnya sosialisasi mengenai program, kebijakan, maupun pengelolaan wisata menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas terkait arah pengembangan kawasan

wisata. Kondisi ini dapat memunculkan kesalahpahaman dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan. Transparansi menjadi unsur penting dalam manajemen destinasi karena dapat membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.

Selanjutnya, aspek akuntabilitas dan distribusi manfaat dari aktivitas wisata dinilai belum jelas oleh masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa manfaat ekonomi dari eksploitasi aspek attractions belum dirasakan secara merata, terutama bagi warga yang berada di sekitar kawasan wisata. Selain itu, belum adanya kejelasan mengenai penggunaan dana atau hasil retribusi wisata membuat masyarakat mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan wisata masih memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih terbuka dan terarah. Sementara itu, pada aspek kolaborasi, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya masih berjalan secara parsial. Koordinasi antaraktor belum terlaksana secara maksimal sehingga beberapa program pengembangan wisata belum berjalan efektif. Padahal, keberhasilan pengelolaan ekowisata sangat bergantung pada sinergi antar pihak yang terlibat. Tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, pengembangan wisata berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat keberlanjutan kawasan wisata itu sendiri.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata di Kereng Bangkirai masih memerlukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh agar komponen *Attractions*, *Amenities*, *Accessibility*, dan *Ancillary Services* dapat berkembang seimbang. Pemerintah dan pengelola perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat transparansi informasi, memperjelas akuntabilitas pengelolaan, serta membangun kerja sama yang lebih baik dengan seluruh pihak terkait. Dengan demikian, pengembangan ekowisata tidak hanya berfokus pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kereng Bangkirai memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan karena didukung oleh keunikan ekosistem air hitam dan hutan rawa gambut yang menjadi bagian penting dari kawasan Taman Nasional Sebangau. Potensi komparatif ini tidak hanya memiliki nilai jual wisata yang tinggi, tetapi juga memegang fungsi krusial sebagai kawasan konservasi yang menjaga keseimbangan lingkungan global. Namun, akselerasi pengembangan ekowisata di

kawasan ini masih terhambat oleh kesenjangan nyata antara potensi alam dengan realitas tata kelola kelembagaan, infrastruktur fisik, serta kesiapan kapasitas lokal di lapangan.

Analisis melalui kerangka teori 4A Alastair M. Morrison menunjukkan bahwa meskipun aspek daya tarik alam (*attractions*) di Kereng Bangkirai sangat kuat, pengembangannya masih lemah dalam hal penyediaan media interpretasi dan edukasi lingkungan yang substansial. Kelemahan ini diperparah oleh belum optimalnya tata kelola fungsional destinasi. Partisipasi masyarakat masih terjebak pada level operasional penunjang semata tanpa menyentuh ruang perencanaan, transparansi informasi kebijakan dari pemerintah masih rendah, akuntabilitas distribusi manfaat ekonomi belum jelas, serta koordinasi antaraktor (*ancillary services*) masih berjalan secara parsial dan sektoral. Keterbatasan sarana fisik (*amenities*), minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta persoalan pengelolaan sampah domestik menjadi potret belum matangnya manajemen destinasi yang ramah lingkungan. Jika tata kelola yang timpang ini dibiarkan, peningkatan arus kunjungan justru berpotensi menjadi bumerang yang memberikan tekanan ekologis yang merusak ekosistem gambut.

Oleh karena itu, keberlanjutan ekowisata Kereng Bangkirai mutlak memerlukan restrukturisasi tata kelola yang terintegrasi dengan penguatan komponen 4A secara menyeluruh. Langkah strategis harus dimulai dengan menggeser peran masyarakat dari sekadar pelaksana operasional menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kawasan, serta meningkatkan literasi wisata melalui media interpretasi berbasis konservasi untuk memperkuat aspek *attractions* dan *ancillary*. Bersamaan dengan itu, pengelola harus membuka akses informasi kebijakan serta memperjelas mekanisme pembagian hasil retribusi wisata agar manfaat ekonomi terdistribusi secara adil dan akuntabel kepada warga sekitar. Terakhir, pembenahan fasilitas penunjang (*amenities*) dan aksesibilitas yang ramah lingkungan harus disokong oleh koordinasi yang solid antarsektor, baik pemerintah, swasta, maupun kelompok sadar wisata. Melalui tata kelola fungsional yang inklusif, transparan, dan terkoordinasi dengan baik, seluruh komponen 4A di Kereng Bangkirai akan saling mendukung untuk menciptakan kelestarian ekosistem gambut sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat lokal dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arianti, S., et al. (2025). Pemberdayaan masyarakat untuk Wisata Air Hitam di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Among*. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/among/article/view/19479>
- Bhayurhama, A. (2017, October 19). Ekowisata di Taman Nasional Sebangau. *Bhayurhama.com*. <https://bhayurhama.com/2017/10/19/ekowisata-di-taman-nasional-sebangau/>
- Bursan, R., et al. (2026). Penguatan kapasitas Pokdarwis untuk pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Pesawaran, Lampung. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri*, 4(1). <https://doi.org/10.61132/ardhi.v4i1.1884>
- Fauzan, I. A., et al. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *EBISNIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 18(2). <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i2.3084>
- Ganisia, A., et al. (2026). Analisis tata kelola kebijakan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Semarang. *Jurnal Media Administrasi*, 11(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v11i1.3664>
- Hartanto, Y. A., et al. (2026). Strategi pengembangan ekowisata berbasis komunitas di kawasan kampung adat: Analisis SWOT pada Pantai Ciberi, Kota Jayapura. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik*, 5(2). <https://doi.org/10.55606/jurritek.v5i2.9365>
- Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya. (2022). *Laporan kajian pemetaan klaster potensi pariwisata Kalimantan Tengah*.
- Putri, R., & Pramezwary, A. (2024). Identifikasi kompetensi sumber daya manusia di Desa Wisata Kereng Bangkirai dalam pengembangan wisata berkelanjutan. *BCE: Journal of Business and Community Engagement*. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/download/1330/988/9041>
- Rhama, B., & Kusumasari, B. (2022). Assessing resource-based theory in ecotourism management: The case of Sebangau National Park, Indonesia. *International Social Science Journal*, 72(245), 123–140. https://bhayurhama.com/wp-content/uploads/2022/06/rbt_ecotourism.pdf
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2022). Tantangan ekowisata di Kalimantan sebagai destinasi ekowisata dunia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pariwisata*, 1(1). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/download/3369/3801>
- Sabtuti, L., Yunikewaty, & Kristiana, T. (2020). Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar obyek wisata Taman Nasional Sebangau Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Jurnal Emas*, 1(1). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/download/2570/2256/6178>
- Setiawan, F., & Triani, E. (2023). Community based tourism di kawasan wisata Kereng Bangkirai. *Jurnal Administrasi Pariwisata*, 1(1). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/download/10860/5179/24900>
- Scribd. (n.d.). *Laporan kajian pemetaan klaster potensi pariwisata Kalimantan Tengah*.

<https://id.scribd.com/document/575377253/Laporan-Kajian-Pemetaan-Klaster-Potensi-Pariwisata-Kalimantan-Tengah>

Wigreny, T., Yunikewaty, & Kristiana, T. (2019). Pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat di Taman Nasional Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah (Studi kasus di Kelurahan Kereng Bangkirai). *Jurnal Emas*, 1(1). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/download/1201/984/2286>

Trimandala, et al. (2026). Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengemasan paket wisata Desa Tihingan Kabupaten Klungkung. *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.61132/bumi.v4i1.1437>